

Jika melihat kaca surupis bekal, ekspor-impor baik-baik saja. Padahal, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dalam kinerja ekspor-impor. Apalagi, dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 5,05 persen pada 2023, ekspor bersih—atau ekspor dikurangi impor—menyumbang 0,66 persen. Tahun lalu, ekspor tumbuh 1,32 persen secara tahunan, sedangkan impor tumbuh minus 1,65 persen.

Nilai ekspor pada Maret 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023. Nilai impor pada Maret 2024 juga lebih rendah daripada Maret 2023. Adapun surplus secara triwulanan, yakni Januari-Maret 2024, lebih rendah ketimbang Januari-Maret 2023. Hal ini terjadi karena ekspor turun hingga nyaris 5 miliar dollar AS. Sebaliknya, nilai impor pada periode itu cenderung tetap.

Indonesia, yang bergantung pada komoditas, menanggung dampak penurunan harga komoditas terhadap kinerja ekspor. Salah satu contohnya, dalam paparan Badan Pusat Statistik (BPS), harga batubara 101,92 dollar AS per ton pada Maret 2023, turun menjadi 76,85 dollar AS pada Maret 2024. Dampak serupa akan terus diterima jika Indonesia terlena dengan terus-menerus mengandalkan komoditas.

Perekonomian China yang belum pulih turut berperan dalam penurunan ekspor Indonesia. Permintaan rendah membuat ekspor nonmigas Indonesia ke China merosot. Padahal, pada Maret 2024, ekspor Indonesia ke China sekitar 22,44 persen dari total ekspor nonmigas. Porsi ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor ke negara lain.

Pada Januari-Maret 2024, mayoritas impor Indonesia berupa bahan baku atau penolong yang mencapai 72,81 persen. Sementara barang modal sekitar 17,2 persen dan barang konsumsi 9,99 persen. Impor bahan baku atau penolong pada triwulan I-2024 anjlok 21,72 persen secara tahunan, sedangkan impor barang modal turun 12,63 persen secara tahunan. Hal ini mengindikasikan ada persoalan dalam proses produksi di Indonesia. Sebab, bahan baku atau penolong dan barang modal digunakan dalam proses produksi.

Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah nilai tukar. Ada berbagai hal yang dipertimbangkan dalam menjaga nilai tukar, antara lain keseimbangan terhadap ekspor dan impor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan menguntungkan eksportir, tetapi membuat pening importir. Situasi lebih rumit akan dihadapi produsen yang mengimpor bahan baku dan barang modal, tetapi memasarkan produknya di dalam negeri dengan harga rupiah.

Keseimbangan nilai tukar kian penting bagi Indonesia yang mengeksportir migas 3,899 miliar dollar AS, tetapi mengimpor hingga 9 miliar dollar AS pada Januari-Maret 2024.

## Tanggung Jawab Produsen Plastik

**P**emerintah Hong Kong melarang kemasan dan alat makan plastik. Keseriusan kebijakan ini patut dipertanyakan karena China produsen plastik terbesar di dunia.

Kompas.id memberitakan, bersamaan dengan Hari Bumi, 22 April 2024, Pemerintah Hong Kong, China, memberi waktu enam bulan bagi rakyatnya, terutama rumah-rumah makan, untuk beradaptasi dan mengubah kemasan mereka menjadi kemasan ramah lingkungan. Penerapan larangan ini menyusul pemecahan undang-undang pada Oktober 2023.

Hong Kong, wilayah di selatan China yang padat dengan 74 juta penduduk, tidak memiliki sarana dan prasarana cukup untuk mengelola sampah. Secara keseluruhan, setiap tahun, Hong Kong rata-rata memproduksi 4 juta ton sampah, dan plastik menempati urutan kedua terbanyak.

Kita tentu mendukung kebijakan wilayah administratif khusus China ini untuk mengurangi plastik yang kian tak terkendali. Berbagai penelitian sudah membuktikan dampak polusi plastik terhadap lingkungan. Mikroplastik bahkan sudah mencemari air minum dalam kemasan.

Masalah plastik tidak hanya terjadi di Hong Kong, tetapi juga global, termasuk juga di Indonesia. Namun, tanpa solusi mendasar produksinya, masalah plastik tidak akan pernah tuntas. Berdasarkan data tahun 2022 dari Statista, China tercatat sebagai produsen terbesar plastik, yaitu 32 persen, diikuti Amerika Utara 17 persen dan Uni Eropa 14 persen.

Sejumlah negara sudah berkomitmen mengurangi penggunaan plastik dan produksinya. Di Indonesia, undang-undang pengelolaan sampah dan peraturan daerah sudah dibuat untuk membatasi penggunaan plastik.

Bersamaan dengan kabar dari Hong Kong tersebut, Reuters memberitakan, para pemimpin global berkumpul di ibu kota Kanada, Ottawa, minggu ini, untuk membahas kemajuan dalam penyusunan perjanjian global pertama untuk mengendalikan melonjaknya polusi plastik.

Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah plastik pada seluruh siklusnya, mulai dari saat diproduksi, bagaimana plastik digunakan, hingga saat plastik dibuang. Kebanyakan plastik murni berasal dari minyak bumi. Banyak negara penghasil petrokimia dan plastik, seperti Arab Saudi, Iran, dan China, menentang pembatasan produksi plastik. Negara-negara produsen ini menghalangi negara-negara lain yang menyerukan pembatasan produksi plastik.

Sementara 60 negara dalam "Koalisi Ambisi Tinggi", seperti Uni Eropa, negara kepulauan, dan Jepang, ingin mengakhiri



# Salah Kaprah Gelar Profesor

Djwantoro Hardjito

Profesor dan Rektor di Universitas Kristen Petra, Surabaya

Tahun 2023, dunia pendidikan tinggi Tanah Air ditandai maraknya pengukuhan profesor-profesor baru, jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**H**al ini buntut dari terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengukuhan dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berimplikasi juga ke para dosen, baik dari perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS).

Dosen berbondong-bondong mengajukan penilaian angka kreditnya sebelum regulasi baru diberlakukan. Peningkatan ini adalah bagian dari reformasi birokrasi.

Di universitas-universitas terkemuka dunia, seorang profesor yang pensiun masih diberi hak menyandang gelar profesor bila mereka yang bersangkutan dipandang memiliki prestasi dan kontribusi istimewa, disebut profesor emeritus. Profesor emeritus umumnya tak menerima gaji lagi, tetapi masih diberi berbagai fasilitas, seperti kantor, kartu nama, e-mail, dan tempat parkir mobil. Tak semua profesor menerima kehormatan ini.

Sebagai pemangku sebuah jabatan, profesor memiliki tanggung jawab dan wewenang tertinggi di dunia akademik. Karena itu, selain tanggung jawab yang pada umumnya harus diemban dosen, seorang profesor juga masih diberi tambahan tanggung jawab khusus, antara lain menulis buku, mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi, dan mendesiminasikannya kepada masyarakat ilmiah dan umum.

Profesor juga diberi wewenang membimbing calon doktor dan dosen dengan jabatan lebih rendah. Artinya, seorang profesor justru memiliki tanggung jawab dan tuntutan kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan dosen-dosen yang nyantri dalam pelaksanaan Tri Dharma PT. Singkatnya, profesor mengemban tugas sebagai pemimpin di dunia akademik (*academic leader*).

Sebagai *academic leader*, seorang profesor atau guru besar justru dituntut menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi dibanding sebelumnya, tak terbatas di bidang-bidang Tri Dharma PT saja.

Dari seorang profesor diharapkan keteladanan dan kepemimpinan, kesediaan membimbing, mengangkat kolega lain dan mahasiswa yang lebih muda, serta berkontribusi positif untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sederhananya, ketika seorang dosen menjadi profesor, harus makin produktif dalam hal publikasi seyogianya juga makin produktif dan lebih berkualitas, menginspirasi lebih baik dan lebih inovatif, demikian juga kepemimpinannya. Bukan sebaliknya.

Karena merupakan jabatan tertinggi, wajar seorang profesor diberikan tuntutan kinerja yang tertinggi, sejalan dengan wewenang dan haknya yang tertinggi, bukan sebaliknya.

Kadang dimaknai, setelah jabatan profesor dicapai, berhenti pula upaya keras untuk meningkatkan kinerja dalam hal pembelajaran mahasiswa, pengembangan keilmuan, ataupun dalam mengabdikannya kepada masyarakat.

Hal ini ada benarnya dengan gelar akademik, tetapi tidak dengan jabatan. Salah kaprah ini yang harus diluruskan.

Dalam salah satu kesempatan memberikan sambutan di acara pengukuhan profesor baru, setengah berseleroah saya sampaikan akan memeriksa akun Scopu para profesor baru ini di tahun-tahun berikutnya. Harus tetap produktif serta menghasilkan publikasi internasional yang baru dan makin meningkat, bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas. Bukan hanya di *prosiding*, tetapi di jurnal internasional, yang tentunya bereputasi.

Singkatnya, profesor seyogianya terus membangun reputasi dan kolaborasinya di ranah internasional.

peroleh ini, tak jarang berbagai upaya yang melangar etika dan norma dihalalkan untuk meraihnya, termasuk munculnya "efek kobra" akibat lebih mengutamakan eksistensi dibandingkan dengan esensi (*Kompas*, 17/4/2024).

Satu hal yang sering dilupakan adalah profesor atau guru besar merupakan jabatan akademik, bukan gelar akademik. Gelar akademik, entah itu sarjana, magister, atau doktor, umumnya bersifat permanen, melekat pada pribadi yang memperolehnya. Beda halnya dengan jabatan, sifatnya tidak permanen, sebaliknya memiliki batas waktu.

UU No 14/2005 menegaskan bahwa jabatan fungsional dosen, termasuk jabatan profesor, melekat pada seorang dosen selama yang bersangkutan masih menjalankan fungsinya sebagai dosen atau masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi atau belum pensiun. Setelahnya, tentunya jabatan akan berakhir, ia tidak lagi menaiki jabatan sebagai profesor atau guru besar.

Di universitas-universitas terkemuka dunia, seorang profesor yang pensiun masih diberi hak menyandang gelar profesor bila mereka yang bersangkutan dipandang memiliki prestasi dan kontribusi istimewa, disebut profesor emeritus. Profesor emeritus umumnya tak menerima gaji lagi, tetapi masih diberi berbagai fasilitas, seperti kantor, kartu nama, e-mail, dan tempat parkir mobil. Tak semua profesor menerima kehormatan ini.

### Pemimpin di dunia akademik

Sebagai pemangku sebuah jabatan, profesor memiliki tanggung jawab dan wewenang tertinggi di dunia akademik. Karena itu, selain tanggung jawab yang pada umumnya harus diemban dosen, seorang profesor juga masih diberi tambahan tanggung jawab khusus, antara lain menulis buku, mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi, dan mendesiminasikannya kepada masyarakat ilmiah dan umum.

Profesor juga diberi wewenang membimbing calon doktor dan dosen dengan jabatan lebih rendah. Artinya, seorang profesor justru memiliki tanggung jawab dan tuntutan kinerja lebih tinggi di-

bandingkan dengan dosen-dosen yang nyantri dalam pelaksanaan Tri Dharma PT. Singkatnya, profesor mengemban tugas sebagai pemimpin di dunia akademik (*academic leader*).

Sebagai *academic leader*, seorang profesor atau guru besar justru dituntut menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi dibanding sebelumnya, tak terbatas di bidang-bidang Tri Dharma PT saja.

Dari seorang profesor diharapkan keteladanan dan kepemimpinan, kesediaan membimbing, mengangkat kolega lain dan mahasiswa yang lebih muda, serta berkontribusi positif untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sederhananya, ketika seorang dosen menjadi profesor, harus makin produktif dalam hal publikasi seyogianya juga makin produktif dan lebih berkualitas, menginspirasi lebih baik dan lebih inovatif, demikian juga kepemimpinannya. Bukan sebaliknya.

### Profesor dituntut kinerja tertinggi

Karena merupakan jabatan tertinggi, wajar seorang profesor diberikan tuntutan kinerja yang tertinggi, sejalan dengan wewenang dan haknya yang tertinggi, bukan sebaliknya.

Kadang dimaknai, setelah jabatan profesor dicapai, berhenti pula upaya keras untuk meningkatkan kinerja dalam hal pembelajaran mahasiswa, pengembangan keilmuan, ataupun dalam mengabdikannya kepada masyarakat.

Hal ini ada benarnya dengan gelar akademik, tetapi tidak dengan jabatan. Salah kaprah ini yang harus diluruskan.

Dalam salah satu kesempatan memberikan sambutan di acara pengukuhan profesor baru, setengah berseleroah saya sampaikan akan memeriksa akun Scopu para profesor baru ini di tahun-tahun berikutnya. Harus tetap produktif serta menghasilkan publikasi internasional yang baru dan makin meningkat, bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas. Bukan hanya di *prosiding*, tetapi di jurnal internasional, yang tentunya bereputasi.

Singkatnya, profesor seyogianya terus membangun reputasi dan kolaborasinya di ranah internasional.

SEPERTI BERTUGAS, PENUHI JANJI!

Saat ini dunia pendidikan tinggi di Indonesia sedang dihadapkan pada banyak tantangan yang luar biasa. Selain disrupsi akibat Revolusi Industri 4.0, dunia pendidikan juga dihadapkan pada berkembang pesatnya kecerdasan buatan (AI) dan hadirnya perguruan-perguruan tinggi asing di Tanah Air.

Makin agresifnya serbuan perguruan tinggi asing dalam perekrutan mahasiswa di Tanah Air menambah kompleks tantangan yang dihadapi. Belum lagi berbagai tantangan akibat perubahan iklim global. Dalam banyak hal, pendidikan tinggi kita masih kalah bersaing. Sudah rahasia umum, perguruan tinggi kita masih kalah jauh dalam persaingan dan kontribusinya di ranah global.

Dalam situasi inilah, bertambah banyaknya jumlah profesor di Tanah Air seyogianya menjadi titik terang pembawa harapan. Bertambah banyaknya jumlah profesor artinya bertambah banyak jumlah pemimpin andal di bidang akademik, yang akan menjadi lokomotif pembawa perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi kita.

Profesor seyogianya tak dibianikan berjuang sendiri. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulasi harus senantiasa melengkap diri dengan mental bertumbuh (*growth mindset*), dengan cepat terus mengadopsi hal-hal baru yang relevan, mengevaluasi regulasi yang ada, memangkas yang menghambat, memberikan berbagai dukungan dan fasilitas, serta menciptakan suasana kondusif dan adil di tengah persaingan dan tantangan perubahan yang kian luar biasa ini.

Mungkin sudah waktunya juga untuk mengevaluasi prosedur dan kriteria promosi jabatan akademik ini. Apakah tidak sebaiknya dipercayakan pada otonomi PT, tidak terpusat secara nasional, yang bahkan juga berlaku untuk dosen-dosen PTS? Demikian juga apakah tidak sebaiknya dilakukan secara kualitatif, bukan kuantitatif, melalui penghitungan jumlah angka kredit (KUM) seperti yang selama ini berlaku?

Sepertinya prosedur seperti ini hanya berlaku di Indonesia, satu-satunya di dunia, tidak berlaku di negara-negara lain. Dan, sepertinya kurang memacu kinerja dan pertumbuhan.

## Sebagai Korupsi dan Pembangunan Desa

Ivanovich Agusta

Sosiolog Perdesaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

**B**egitu cakrawala 2024 terbit, desa babak belur digempur narasi akbar korupsi. Isu video *Dirty Vote* ataupun opini media massa dan sosial tentang korupsi desa, yang dikaitkan dengan pilihan politik kepala desa, tak kalah.

Akan tetapi, sesungguhnya korupsi desa tak semasih itu dalam realitasnya, dilihat dari

luruhan nilai korupsi di Indonesia sebesar Rp 42,747 triliun.

Hanya saja, angka koruptor dan nilai korupsi desa tidak persis sama saat dibandingkan dengan antarlaporan lintas tahun. Ada kalanya kategori kepala desa terpisah, pernah disatukan dengan perangkatnya, juga sempat bergabung bersama camat. Konsekuensi selisihnya ti-

lalu. Dan, korupsi desa yang koruptor. Pada 2016, koruptor merugikan desa rata-rata Rp 1,8 miliar. Ini angka yang terlalu tinggi untuk korupsi setaun, kecuali untuk desa terpencil.

Sampai 2022, koruptor rata-rata merugikan desa Rp 1 miliar. Dengan membandingkan rata-rata penyaluran dana desa Rp 930 juta per desa dan nilai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) per desa, korupsi dana desanya sendiri. Mestinya, ini sudah cukup untuk tetap percaya pada desa.

**Not korupsi**

Tulisan ini bukan dimaksudkan sebagai apologi korupsi. Proporsi korupsi desa yang sangat kecil tidak sebanding dengan diskursusnya. Apalagi, kepala desa yang menjerahtera-

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke [www.kompas.id/kirim-opini](http://www.kompas.id/kirim-opini)

## POJOK

Kemengaran pasangan Prabowo-Gibran sah. Selamat... nanti